

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hubungan diplomatik antara China dan Amerika Serikat sudah sangat tegang dengan perdagangan dan perang ideologi yang sering terjadi dari dulu. Ketegangan ini semakin diperburuk saat Amerika Serikat berada di bawah kepemimpinan Presiden Trump dengan serangkaian kebijakan seperti tarif AS yang dikenakan pada produk China, peningkatan tarif oleh otoritas China pada produk AS, pengesahan undang-undang oleh Kongres AS yang melarang penggunaan peralatan dari Huawei, Dahua Technology, ZTE, dan Hikvision oleh berbagai administrasi AS, dll. Akibatnya, China berubah dari yang awalnya sebagai mitra dagang nomor satu Amerika Serikat, menjadi ketiga dalam rentang waktu antara Januari dan Juni 2019.

Huawei sendiri adalah perusahaan yang relatif muda jika dilihat dari pandangan yang lebih luas. Ren Zhengfei mendirikan Huawei pada tahun 1987 setelah pemberhentian dirinya dari tentara pembebasan rakyat di China. Sejarah militer Zhengfei membantu Huawei mendapatkan beberapa kontrak besar pertamanya. Pada akhir tahun 2000-an, Huawei tumbuh dengan cepat. Perusahaan mulai mengakuisisi perusahaan lain untuk memperluas operasinya. Dalam beberapa kesempatan, Huawei mencoba membeli perusahaan non-China. Namun, hal tersebut sering kali dicegah oleh negara lain. Alasan dibalik pemblokiran tersebut selalu sama yaitu terkait dengan dugaan hubungan mendalam Huawei dengan pemerintah China dan kemungkinan ancaman keamanan yang diwakilinya.

Pada tahun 2009, Huawei mulai membuat *smartphone*. Ponsel pintar keluaran Huawei ini menjadi populer dan sangat diminati lantaran perangkatnya dirancang dengan baik serta memberi label harga yang sangat wajar dibandingkan kompetitor lainnya. Pada tahun 2016, Huawei meyakini akan menjadi produsen *smartphone* terbesar di dunia dalam kurun waktu lima tahun. Pada tahun 2018, Huawei nampaknya akan mewujudkan keyakinannya dengan mengambil tempat kedua dari Apple dan berada tepat di belakang Samsung. Hal ini adalah prestasi luar biasa mengingat Huawei dihambat karena tidak hadir di Amerika Serikat yang saat ini menjadi pasar terbesar ketiga di dunia.

Pada awal 2019, perusahaan ini diharapkan menjadi produsen *smartphone* terbesar di dunia pada akhir tahun dan mencuri mahkota dari Samsung. Terlepas dari

kesuksesan tersebut, Huawei telah banyak mendapatkan tuduhan selama bertahun-tahun lamanya tentang praktik bisnis yang curang hingga mendapat tuduhan bahwa China menggunakan produk Huawei sebagai alat untuk memata-matai negara lain. Hal tersebut sangatlah mengkhawatirkan untuk negara lain mengingat bagaimana dekatnya hubungan perusahaan ini dengan pemerintah China.

Donald Trump pada Mei 2019 sebagai Presiden Amerika Serikat saat itu mengumumkan bahwa Huawei bersama dengan beberapa perusahaan China lainnya kini masuk dalam daftar “*Entity List*”. Perusahaan yang terdapat dalam daftar ini tidak dapat melakukan bisnis dengan organisasi manapun yang beroperasi di Amerika Serikat. Oleh karena itu, Huawei kehilangan aksesnya terhadap beberapa organisasi vital di Amerika yang sangat penting bagi Huawei. Pembatasan yang dilakukan Amerika Serikat tersebut banyak mendapat pertanyaan. Sebab Huawei diketahui menjadi salah satu perusahaan yang diandalkan oleh Amerika Serikat dalam hal keamanan siber. Hal tersebut dikarenakan superioritas Huawei yang mampu memberikan jaminan keamanan siber bagi Amerika Serikat. Mengetahui hal tersebut, maka kebijakan Amerika Serikat terhadap Huawei patut dipertanyakan. Terlebih lagi Amerika Serikat mengangkat isu ancaman keamanan yang sangat berbanding terbalik dengan kerja sama Huawei dengan pemerintah Amerika dalam hal keamanan siber.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengapa Amerika Serikat memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas dagang Huawei?

## **C. Kerangka Teori**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis ajukan, untuk menganalisis mengapa Amerika Serikat memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas dagang Huawei, maka penulis akan menggunakan kerangka berpikir yaitu:

### **1. Konsep Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional berangkat dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan sebuah negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mana meliputi kondisi internal, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, bahkan sosial-budaya. *Power* yang ingin diciptakan oleh suatu negara juga menjadi salah satu hal yang mendasari suatu kepentingan nasional dari suatu negara, sehingga negara tersebut mampu untuk mempertimbangkan dampak langsung untuk mendapat pengakuan dunia.

Masyarakat akan selalu menyoroiti kebijakan luar negeri suatu negara sebagai suatu gambaran atas apa yang menjadi kepentingan negara tersebut. Maka dari itu, kepentingan nasional suatu negara secara konsep diciptakan untuk menjelaskan dan menggambarkan sikap politik luar negeri sebuah negara (Sitepu, 2011). Kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional adalah sebuah konsep yang sangat erat kaitannya dalam hubungan internasional karena kepentingan nasional adalah dasar dari sebuah kebijakan luar negeri suatu negara yang pada akhirnya akan mengarahkan terciptanya kebijakan luar negeri itu sendiri. Maka dari itu, konsep kepentingan nasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan luar negeri negara yang berdaulat (Abdulrasheed Adamu, 2016). Morgenthau menyimpulkan bahwa kepentingan nasional suatu negara adalah upaya negara untuk mempertahankan identitasnya dari ancaman negara-negara yang lain. Kemudian, identitas tersebut akan menjadi tujuan-tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh suatu negara dan bertujuan sebagai faktor utama dalam membentuk kebijakan politik luar negeri (Plano, 1969). Morgenthau mengartikan kepentingan nasional sebagai sebuah usaha oleh suatu negara dalam mengejar *power*, yang mana *power* adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk mengendalikan negara lain dan hal-hal sekitar yang bersangkutan. Dalam konsep kepentingan nasional, sebenarnya mengandung makna untuk melindungi, membela, dan memelihara negara itu sendiri.

Pada kasus kebijakan Amerika Serikat dalam pelarangan produk Huawei, tentunya Amerika Serikat yang pada masa itu dipimpin oleh Donald Trump menjadikan kepentingan nasionalnya sebagai landasan utama dalam mengeluarkan kebijakan tersebut. Kebijakan pelarangan produk Huawei dalam hal pemasaran dan juga pembangunan proyek 5G dapat diartikan bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan negara. Tak bisa dipungkiri bahwa Huawei sudah banyak mendapat tuduhan tentang perangkat yang mereka ciptakan diduga kuat menjadi sarana atau alat penyadapan. Dengan kata lain, kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat pada saat itu merupakan salah satu langkah untuk melindungi diri dari ancaman-ancaman seperti spionase. Pada saat yang bersamaan di tahun 2019, ekonomi China sedang mengalami suatu pertumbuhan yang sangat luar biasa dan sedang marak desas-desus tentang perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Maka dapat dilihat, selain alasan keamanan yang menjadi kepentingan nasional Amerika Serikat, faktor kepentingan ekonomi pun tak bisa dipungkiri keberadaannya. Amerika Serikat memiliki anggapan bahwa dengan

melakukan pembatasan aktivitas dagang terhadap suatu perusahaan negara rival setidaknya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi China. Nantinya, Amerika Serikat dapat menjaga dominasi ekonominya di hadapan dunia.

Kepentingan nasional Amerika Serikat yang didasarkan pada keamanan dan ekonomi merupakan hal yang semestinya. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat pada era Trump memang memiliki kepentingan untuk memajukan perekonomiannya dengan dasar pemerintahan sebelumnya, yang mana pada saat Barack Obama menjabat selama delapan tahun perekonomian Amerika mengalami penurunan yang signifikan. Obama merupakan satu-satunya Presiden Amerika Serikat dalam sejarah modern yang pertumbuhan ekonominya tidak mencapai 3% dalam setahun tepatnya pada tahun 2016. Kepemimpinan Herbert Hoover pada 1929-1933 juga memiliki angka pertumbuhan ekonomi yang tidak sampai 3% dalam setahun. Namun, kondisi itu jelas jauh berbeda dikarenakan memang pada saat itu ekonomi dunia sedang mengalami keterpurukan. Setelah saat itu, Amerika Serikat tidak pernah mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah 3% sampai akhirnya terulang di tahun 2016 (Ventura, 2016).

## **2. Teori Sekuritisasi**

Teori sekuritisasi adalah tindakan merubah suatu subjek menjadi persoalan keamanan negara. Ini adalah suatu tindakan politisasi yang akan membenarkan segala cara demi menjaga keamanan negara. Isu yang diangkat untuk disekuritisasi tidak selalu bersifat politik. Namun setelah disekuritisasi, isu tersebut dapat dipandang sebagai persoalan hidup dan mati (Buzan, Wæver, & de Wilde, 1998).

Sebuah isu ada di tahap non-politis ketika isu tersebut menjadi hanya bagian dari diskusi di tengah masyarakat dan belum menjadi perbincangan pada level yang lebih tinggi yaitu pemerintahan. Selanjutnya isu tersebut akan masuk ke dalam proses politis ketika isu tersebut menjadi topik perbincangan, perundingan, hingga perdebatan pada level pemerintahan. Lalu pada tingkatan terakhir, sebuah isu dikatakan telah tersekuritisasi ketika aktor, baik negara maupun non-negara, telah menyepakati adanya ancaman dan perlunya mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman tersebut.

Para aktor sekuritisasi seringkali menggunakan speech act sebagai suatu alat untuk mengonstruksi isu menjadi sebuah ancaman keamanan dan untuk meyakinkan dan memberi peringatan masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan

dari ancaman tersebut. Tindakan tersebut diharapkan dapat menggiring opini publik dan memberikan aktor-aktor sekuritisasi kesempatan untuk memobilisasi kekuasaan negara dalam membentuk peraturan demi menghentikan ancaman yang ada.

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan dari latar belakang dan kerangka teoritik di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Amerika Serikat memberlakukan kebijakan pembatasan aktivitas dagang Huawei karena merasa terancam dengan perkembangan China dan isu keamanan menjadi hasil dari sekuritisasi yang dilakukan Amerika Serikat.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode ini bersifat studi pustaka (*library research*) yang mana menggunakan buku, jurnal dan literatur lainnya sebagai objek utama (Hadi, 1995). Metode kualitatif ini menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat dari catatan yang telah diteliti (Bagoes, 2004).

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan dari penelitian ini dimulai dari Mei 2019 dimana Presiden Donald Trump memasukan Huawei sebagai salah satu perusahaan yang dilarang melakukan kerja sama dengan perusahaan Amerika Serikat sampai dengan tahun 2022 terkait kondisi kebijakan tersebut.

#### **G. Tujuan Penelitian**

Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi alasan dibalik kebijakan Amerika Serikat membatasi aktivitas dagang Huawei. Penelitian ini juga memiliki tujuan sebagai sarana pembuktian penulis dan mempraktikkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan melalui aplikasi teori dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab I, Menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesis, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, penulis membahas kebijakan Amerika Serikat terhadap Huawei yang meliputi juga hubungan antara Amerika Serikat dengan China dan perang dagang yang terjadi.

Bab III, penulis akan menjelaskan tentang ketakutan-ketakutan Amerika Serikat terhadap Huawei.

Bab IV, bab ini berisikan tentang kesimpulan penelitian.